

**PENGARUH *FRAUD DIAMOND* BAGI KECURANGAN  
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA  
(Studi Kasus Pada Pemerintah Desa Kecamatan Sidoarjo)**

***THE IMPACT OF DIAMOND FRAUD ON FRAUD VILLAGE  
FINANCIAL MANAGEMENT  
(Studi Case in The Village Government of Sidoarjo Sub-District)***

**Sri Puspita Sari**

sripuspitasari90@gmail.com  
Universitas Jember

**Kartika**

Ika\_mlg0082@yahoo.co.id  
Universitas Jember

**Whedy Prasetyo**

whedy.p@gmail.com  
Universitas Jember

***ABSTRACT***

*Heritage assets become one of the assets owned by the government. Heritage asset accounting treatment is also inseparable from the problems of recognition, valuation and disclosure. This article tries to explain the reality that occurs in the implementation of policies related to accounting treatment for heritage assets. Based on the results of research on the heritage assets of the Museum of Ten November through interviews with informants and data analysis, it can be concluded that the accounting treatment of some of the heritage assets of the Museum of Ten November has been in accordance with applicable regulations, namely PP No. 71 Year 2010. Criteria for heritage assets belonging to the Museum of Ten November in accordance with the criteria for heritage assets listed in PP No. 71 of 2010. While in terms of valuation, the heritage assets of the Museum of Ten November are carried out appraisal especially for heritage assets which are acquired by way of buying. Disclosure of heritage assets belonging to the Ten November Museum is disclosed in the Notes to the Financial Statements (CALK) by stating the values and mentioned as historical objects.*

***Keywords: Disclosure, Heritage Assets, Recognition, Valuation***

**1. PENDAHULUAN**

Kecurangan (*fraud*) merupakan perilaku penipuan yang disengaja maupun tidak disengaja dilakukan oleh individu atau kelompok guna memperoleh sesuatu yang diinginkan dengan cara merugikan orang lain. Menurut (IAI, 2012) *Fraud* adalah kecurangan yang dalam pelaporan keuangan berupa salah saji yang dilakukan secara sengaja guna untuk mengelabui pemakai laporan keuangan dan timbulnya perlakuan yang tidak wajar terhadap aktiva yang tidak disajikan sesuai prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia.

Di Indonesia tindakan kecurangan akuntansi dibagi menjadi dua sektor, yaitu: sektor publik dan sektor swasta. Menurut Sulastrri dan Simanjuntak (2014) kecurangan banyak terjadi dikalangan instansi pemerintah, karena instansi pemerintah merupakan struktur organisasi yang kompleks, sistem birokrasi yang rumit, sistem pengendalian yang rendah, dan terjadi tekanan yang tinggi. Korupsi merupakan salah satu kecurangan akuntansi yang banyak dilakukan. Korupsi muncul dinegara berkembang, karena mereka berlomba-lomba untuk memenuhi gaya hidup yang konsumtif, sifat yang rakus, penegak hukum yang lemah, serta rendahnya tingkat kesadaran akan moral yang baik. Pada instansi pemerintah sendiri telah banyak ditemukan tindakan korupsi, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Dalam *Indeks Persepsi Korupsi* 2018 menyebutkan Indonesia menempati peringkat 89 dengan jumlah negara 180 dengan skor 38. Pada lingkup di negara ASEAN, Indonesia menduduki peringkat ke empat setelah negara Singapura Menurut data ICW tahun 2018 terdapat 1.087 tersangka yang terjerat tindakan korupsi. Tindakan korupsi yang melibatkan kepala daerah maupun kepala desa terdapat 139 kasus, paling sering terjadi di Provinsi Jawa Timur dengan 68 tindakan korupsi yang menghabiskan Rp. 90,2 M, disusul Provinsi Jawa Barat sebesar Rp. 647 M dengan 42 tindakan dan Sumatera Utara dengan 40 tindakan.

Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Sidoarjo menjadi salah satu kota perekonomian bagi Kota Surabaya dan kawasan Gerbangkertosusila, karena terdapat berbagai potensi usaha pada bidang industri, perdagangan, pariwisata dan usaha-usaha kecil menengah serta letak wilayah yang strategis dan sumber daya manusia yang memadai. Maka perkembangan Kabupaten Sidoarjo mampu menjadi daerah yang menjanjikan bagi pengembangan perekonomian regional.

Tetapi sangat disayangkan, perkembangan perekonomian ini tidak dibarengi oleh perilaku yang baik, masih ditemukan kasus penyalahgunaan kekuasaan di Kabupaten Sidoarjo. Pada tahun 2018 terdapat kasus korupsi proyek pembangunan TPST sebesar Rp. 590 Juta. Pada tahun 2017 terdapat kasus korupsi APBDes sebesar Rp. 227 Juta yang menyeret Kepala Desa Wonokupang. Sedangkan tahun 2016 dan 2015 ditemukan Kepala Desa Pewasahan dan Kepala desa Glagah Arum melakukan korupsi APBDes 2016 yang merugikan Rp. 52 Juta dan Rp. 225 Juta, sedangkan pada 2015 terdapat Bendahara Desa Pilang melakukan APBDes yang menghabiskan Rp. 600 Juta (sumber: kerjarisidoarjo).

Pada awal tahun 2015 pemerintah pusat resmi menerapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Dimana undang-undang mengatur dan mengelola keuangan desa yang dialokasikan khusus pada APBN. Dana yang diberikan oleh disebut dana desa yang merupakan anggaran yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah desa yang berasal dari APBN. Dana desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, untuk pemerataan pembangunan infrastruktur maupun non-infrastruktur di desa.

Pada awal penerapan undang-undang tersebut pemerintah pusat telah mengeluarkan dana desa sebanyak Rp 20,8 Triliun dengan penyerapan sebesar 82,72%. Pengalokasian dana desa mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2016 dana yang dikeluarkan sebanyak Rp 47 Triliun penyerapan sebesar 97,65%. Pada tahun 2017 dana yang dikeluarkan sebanyak Rp 60 Triliun penyerapan sebesar 98,54%. Sedangkan pada tahun 2018 telah mencapai daya serap sebesar 99% (sumber: databoks.katadata.co.id).

Tetapi pratiknya dana desa menjadi tujuan utama seseorang untuk melakukan tindakan kecurangan. Peneliti dari ICW tahun 2015-2018 terdapat 181 kasus korupsi dana desa yang merugikan Indonesia sebanyak Rp. 40,6 miliar yang menjerat 141 kepala desa. ICW menilai meningkatnya kasus korupsi dana desa ini karena minimnya kompetensi pegawai pemerintah desa, tidak adanya transparansi serta didukung oleh pengawasan yang lemah.

Faktor pendukung itulah yang menjadikan para pelaku kecurangan dapat dengan mudah melakukan korupsi. Faktor lainnya karena merasa kompensasi yang diterima sangat rendah bahkan tidak sebanding dengan apa yang telah dikerjakaan, sehingga banyak pegawai yang melakukan berbagai cara untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Faktor penyebab terjadinya kecurangan menurut teori *diamond fraud* adalah *capability* sebagai faktor penentu terjadinya kecurangan. *Triangle fraud* yang dipaparkan oleh Cressey (1953) disempurnakan dalam bentuk *diamond fraud* dimana teori kecurangan ini terdapat 4 elemen, yaitu: *pressure*, *opportunity*, *rationalization*, dan *capability*.

*Pressure* merupakan salah satu elemen untuk melakukan kecurangan agar dapat memenuhi gaya hidup dan kebutuhan ekonomi. Berbagai gaya hidup dan kebutuhan ekonomi yang sangat banyak mampu membuat seseorang untuk melakukan segala tindakan kecurangan agar dapat memenuhi keinginannya. Pada *pressure* ini diprosikan sebagai kesesuaian kompensasi

Kesesuaian kompensasi merupakan bentuk balas jasa yang diberikan kepada karyawan iatas kerja kerasnya kepada perusahaan atau organisasi (Ardana. 2012:153). Sedangkan menurut Sastrohadiwiryono (2011:125), kompensasi merupakan imbalan atau balasi jasa yang diberikan kepada pegawai, karena telah melakukan pekerjaan dalam bentuk tenaga maupun pemikiran untuk dapat memajukan perusahaan dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan iadanya kesesuaian kompensasi yang diberikan kepada para pegawai dapat membuat pegawai terdorong untuk selalu melakukan pekerjaannya dengan baik dan benar serta berguna untuk mengurangi adanya tindakan kecurangan.

*Opportunity* merupakan peluang yang terdapat dalam organisasi yang dimanfaatkan oleh pelaku kecurangan untuk melakukan tindakan kecurangannya yang didukung oleh lemahnya sistem pengendalian intern, kurangnya kedisiplinan pegawai, serta lemahnya mekanisme audit. Pengendalian intern menjadi tolak ukur sebuah keberhasilan setiap organisasi, apabila sebuah pengendalian internnya lemah maka akan banyak timbul kecurangan yang dilakukan. Pada *opportunity* ini diprosikan sebagai sistem pengendalian intern pemerintah.

Sistem pengendalian intern merupakan kebijakan perusahaan dalam melakukan perlindungan atas kekayaan dari adanya tindakan kecurangan, menjamin informasi yang diberikan akurat, serta melakukan evaluasi terhadap peraturan yang berlaku apakah sudah dijalankan dengan semestinya oleh para pegawai (Hery, 2013:159). Menurut Ardiyos (2012:11), sistem pengendalian intern merupakan sistem terstruktur otomatis yang saling berhubungan antara bagian satu dengan lainnya dalam melakukan pekerjaannya. Sistem pengendalian intern pemerintah merupakan tata lkelola pemerintah dalam mewujudkan pemerintahani yang *good govermence* serta dalam meningkatkan tujuan dan sarana yang dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dengan adanya sistem pengendalian intern yang baik dan benar dapat memudahkan perusahaan atau organisasi dalam melakukan pekerjaan serta melakukan pengawasan terhadap pekerjaan yang dilakukan, dan dapat mengetahui apakah terjadi tindakan kecurangan dalam perusahaan ataupun organisasi.

*Rationalization* merupakan elemen yang sulit untuk diukur karena sebuah pemikiran seseorang yang selalu membenarkan semua perbuatan yang dilakukannya, maka hal ini yang menimbulkan berbagai tindakan kecurangan. Mustikakasari (2013) memaparkan sikap komitmen manajemen yang baik dapat menghasilkan individu yang sesuai dengan norma-norma serta didukung dengan budaya organisasi yang baik akan menjauhkan seseorang tersebut dari tindakan kecurangan. Pada *rationalization* ini diproksikan sebagai budaya organisasi.

Budaya organisasi adalah sikap dan perilaku yang dilakukan oleh dalam organisasi yang berhubungan dengan lingkungan intern maupun ekstern (Ernie dan Saefullah, 2006:71). Sedangkan menurut Griffin (2002:162), budaya organisasi yaitu kumpulan nilai, keyakinan serta kebiasaan yang digunakan anggota organisasi dalam memahami peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh organisasi. Budaya organisasi merupakan sistem yang dibuat secara formal yang dilakukan dua orang atau lebih lguna mencapai tujuan (Hasibuan, 2007:202). Dengan begitu budaya organisasi merupakan nilai sikap yang terpendam dalam diri individu pada saat melakukan ataupun menjalankan peraturan yang berlaku dalam organisasi. Tata kelola budaya organisasi yang baik akan berpengaruh terhadap keberhasilan, karena budaya organisasi yang digunakan membuat para pegawai untuk melaksakan dan mematuhi akan peraturan yang berlaku.

*Capability* merupakan perilaku yang dimiliki oleh pelaku *fraud* untuk melakukan tindakan kecurangan yang didukung dengan kesempatan yang ada. Kemampuan individu adalah sifat yang dimiliki oleh pribadi seseorang dan kemampuan yang mendorong pelaku *fraud* untuk melakukan tindakan kecurangan (Wolfe dan Hermason: 2004). Pada *capability* ini diproksikan sebagai kompetensi yang dimiliki seseorang tersebut.

Kompetensi merupakan bakat yang sudah ada sejak lahir, adanya proses dalam belajar, serta adanya pengalaman dalam melakukan pekerjaan (Sigit: 2003:24). Sedangkan menurut Kreitner (2005:185), kemampuan merupakan sikap yang dimiliki oleh individu dalam menghadapi tindakan ataupun permasalahan tanpa adanya pengaruh dari orang lain. Kemampuan merupakan sifat yang dimiliki oleh individu yang berasal dari bawaan lahir atau dalam proses belajar untuk menyelesaikan pekerjaan (Soelaiman, 2007:112). Dimana kompetensi merupakan sikap yang terdapat dalam diri individu yang sudah ada sejak lahir maupun melalui proses belajar yang digunakan oleh individu untuk menyelesaikan pekerjaan atau melakukan segala sesuatu. Dengan adanya kompetensi yang terdapat dalam diri individu dapat menjadi dorongan untuk melakukan segala cara, baik itu cara yang baik maupun dalam melakukan cara yang buruk, seperti melakukan tindakan kecurangan.

Telah banyak peneliti yang meneliti faktor mendorong adanya kecurangan. Zulkarnain (2013) meneliti Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya *Fraud* Pada Dinas Kota Surakarta, yang menghasilkan kecurangan sektor pemerintah berpengaruh negatif signifikan terhadap variabel independen pengendalian intern, kesesuaian kompensasi serta gaya kepemimpinan, untuk perilaku tidak etis pengaruh positif dengan kecurangan, sedangkan kultur organisasi tidak berpengaruh dengan kecurangan dan penegakan hukum menunjukkan terdapat pengaruh dengan kecurangan pada sektor pemerintahan. Hasil itu diperkuat oleh Laksmi dan Sujana (2019) Meneliti Pengaruh Kompetensi Sdm, Moralitas Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. Hasil penelitiannya menunjukkan kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern dan moralitas memiliki pengaruh positif signifikan terhadap menghindarkan kecurangan pada pengelolaan keuangan desa. artinya kecurangan pada

pemerintah desa dapat dicegah dengan pengendalian intern yang kuat, pemberian kompensasi yang sesuai dan moralitas yang baik.

Berdasarkan latar belakang dapat diambil rumusan masalah: Apakah kesesuaian kompensasi berpengaruh terhadap kecurangan pengelolaan keuangan desa? Apakah keefektifan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) berpengaruh terhadap kecurangan pengelolaan keuangan desa? Apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap kecurangan pengelolaan keuangan desa? Apakah kompetensi berpengaruh terhadap kecurangan pengelolaan keuangan desa?

Berdasarkan rumusan masalah dapat diambil tujuan penelitian: Untuk menguji secara empiris pengaruh kesesuaian kompensasi berpengaruh terhadap kecurangan pengelolaan keuangan desa; Untuk menguji secara empiris pengaruh keefektifan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) berpengaruh terhadap kecurangan pengelolaan keuangan desa; Untuk menguji secara empiris pengaruh budaya organisasi berpengaruh terhadap kecurangan pengelolaan keuangan desa; Untuk menguji secara empiris pengaruh kompetensi berpengaruh terhadap kecurangan pengelolaan keuangan desa?

## 2. METODE ANALISIS DATA

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan data primer. Pada penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai metode dalam pengumpulan data. Kuesioner disini dibagikan langsung kepada pegawai-pegawai pemerintah desa yang ada di Kecamatan Sidoarjo. Dalam kuesioner peneliti melakukan pengujian kepada pegawai-pegawai pemerintah desa tentang faktor-faktor penyebab terjadinya kecenderungan kecurangan dalam instansi pemerintah desa berdasarkan teori *Fraud Diamond*. Penelitian ini menggunakan variabel kesesuaian kompensasi, gaya kepemimpinan, keefektifan sistem pengendalian internal pemerintah, penegakan hukum, budaya organisasi, perilaku tidak etis, dan kompetensi sebagai variabel independen terhadap *fraud* pengelolaan keuangan pemerintah desa di Kecamatan Sidoarjo.

Populasi dalam penelitian ini merupakan aparatur desa yang membantu kepala desa dalam mengelola keuangan desa, yang terdiri dari: kepala desa, sekretaris desa, bendaharai desa, dan kepala seksi desa. Kecamatan Sidoarjo memiliki daerah pemerintahan desa sebanyak 10 desa dan 14 kelurahan dengan jumlah pegawai desa sebanyak 190 orang yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, kepala seksi pemerintahan, kepala seksi pelayanan, kepala seksi kesejahteraan, kepala seksi perencanaan, dan kepala seksi tata usaha dan umum. ([www.sidoarjokab.bps.go.id](http://www.sidoarjokab.bps.go.id)). Melihat jumlah objek populasi yang banyak, maka dibutuhkan sampel penelitian guna untuk mengurangi adanya permasalahan dalam tenaga, waktu bahkan biaya dalam pengambilan data.

Sampel penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel dengan teknik *purposive sampling*, dimana dalam teknik ini hanya mengambil pegawai-pegawai pemerintah desa yang memiliki standar pengalaman kerja minimal satu tahun dan yang memahami tentang pengelolaan keuangan desa. Dimana pada teknik ini dihasilkan 69 responden yang akan menerima data kuesioner.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

Analisis regresi berganda dilakukan untuk mengetahui hubungan kesesuaian kompensasi, sistem pengendalian internal pemerintah, budaya organisasi, kompetensi

terhadap kecurangan pada pemerintah desa tentang bagaimana pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa. Hasil analisis tersebut seperti pada hasil di bawah ini:

**Tabel 4.12 Hasil Regresi X terhadap Y**

Model	Unstandardized		Standard	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
Constan	17,983	1,358		13,245	,000
(X1)	-,120	,045	-,274	-2,686	,009
(X2)	-,085	,034	-,241	-2,478	,016
(X3)	-,161	,036	-,428	-4,500	,000
(X4)	,092	,038	,203	2,437	,018

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Maka dapat dibuat persamaan rumus analisis regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan :

- Y = Kecurangan (*Fraud*)
- $\alpha$  = Konstanta
- $\beta$  = Koefisien Regresi
- X1 = Kesesuaian Kompensasi
- X2 = Keefektifan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- X3 = Budaya Organisasi
- X4 = Kompetensi
- e = Kesalahan regresi (error)

Maka

$$Y = 17,983 - 0,120 - 0,085 - 0,161 + 0,092 + e$$

Hasil persamaan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Konstanta pada variabel kesesuaian kompensasi (X1), sistem pengendalian internal pemerintah (X2), budaya organisasi (X3), kompetensi (X4) terhadap kecurangan (Y) sebesar 17,983.
2. Koefisien regresi kesesuaian kompensasi (X1) bernilai negatif sebesar -0,120, dimana hal tersebut menunjukkan bahwa kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif terhadap kecurangan. Kesesuaian kompensasi memiliki nilai  $t_{hitung}$  sebesar -2,686 dengan sig 0,009. Maka pada  $H_1$  menghasilkan  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , sehingga  $H_1$  diterima dan signifikan terhadap kecurangan.
3. Koefisien regresi sistem pengendalian internal pemerintah (X2) bernilai negatif sebesar -0,085, dimana hal tersebut menunjukkan bahwa SPIP berpengaruh negatif terhadap kecurangan. SPIP memiliki nilai  $t_{hitung}$  sebesar -2,478 dengan sig 0,016. Sehingga  $H_2$  nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , yang artinya  $H_2$  diterima dan signifikan terhadap kecurangan.
4. Koefisien regresi budaya organisasi (X3) bernilai negatif sebesar -0,161, dimana hal tersebut menunjukkan bahwa budaya organisasi berpengaruh negatif terhadap kecurangan. Budaya organisasi pada nilai  $t_{hitung}$  sebesar -4,500 dengan nilai sig 0,000.

Maka pada  $H_3$  menunjukkan nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$ . Sehingga  $H_3$  diterima dan signifikan terhadap kecurangan.

5. Koefisien regresi kompetensi (X4) bernilai negatif sebesar 0,092, dimana hal tersebut menunjukkan bahwa kompetensi berpengaruh positif terhadap kecurangan. Kompetensi memiliki nilai  $t_{hitung}$  sebesar 2,437 nilai sig 0,018. Maka pada  $H_4$  nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , sehingga  $H_4$  diterima dan signifikan terhadap kecurangan.

#### 4. PEMBAHASAN

##### 1. Pengaruh Kesesuaian Kompensasi Terhadap Kecurangan Pada Pengelolaan Keuangan Desa

Sesuai dengan hasil analisis yang telah dibahas diatas, kesesuaian kompensasi memiliki hasil  $t_{hitung}$  sebesar  $-2,686$  dengan tingkat sig sebesar  $0,009$  yang artinya kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif signifikan terhadap kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa pada Kecamatan Sidoarjo. Hasil itu menunjukkan para pegawai pemerintah desa pada Kecamatan Sidoarjo merasa pemberian kompensasi yang diberikan sudah sesuai dengan apa yang telah menjadi tanggungjawab dan tugasnya, hal tersebut juga sesuai dengan data statistik dimana pegawai yang menerima pemberian kompensasi yang sesuai sudah rata-rata  $27,39$  dengan  $69$  responden. Hasil ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan Sari, Arza, dan Taqwa (2019) yang menunjukkan bahwa kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif signifikan terhadap tindakan kecurangan akuntansi di sektor pemerintah. Apabila pemberian kompensasi yang diberikan kepada para pegawai terlalu kecil maka akan membuat para pegawai tidak segan-segan untuk melakukan tindakan-tindakan kecurangan yang dilakukan untuk dapat memperoleh kompensasi yang sesuai dengan keinginannya. Oleh sebab itu pemberian kompensasi yang sesuai sangat lah penting bagi para pegawai pada pemerintah desa untuk kelangsungan hidup mereka beserta dalam memenuhi kebutuhannya. Dengan adanya pemberian kompensasi yang sesuai dapat mempengaruhi kinerja, kualitas kerja dan hasil yang dihasilkan oleh para pegawai dalam menjalankan birokrasi pada pemerintah desa setempat. Pemberian kompensasi yang sesuai juga dilakukan untuk memberikan rasa bangga terhadap kinerja dan kerja keras yang telah dilakukan oleh para pegawai dalam jalannya sistem pemerintahan pada desa yang tentunya dilakukan untuk memajukan dan menyejahterakan masyarakat desa setempat. Dapat diambil garis besar bahwa kesesuaian kompensasi yang diberikan kepada pegawai mempunyai pengaruh terhadap mencapai tujuan dari pemerintah desa itu sendiri. Apabila kesesuaian kompensasi tidak diberikan dengan semestinya maka akan timbul tindakan-tindakan yang melanggar hukum dan tentunya merugikan pemerintah itu sendiri dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa tersebut. Oleh sebab itu kesesuaian kompensasi juga perlu diperhatikan dalam melakukan segala sesuatunya.

##### 2. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kecurangan Pada Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas membuktikan sistem pengendalian intern pemerintah memiliki hasil  $t_{hitung}$  sebesar  $-2,478$  dengan tingkat sig sebesar  $0,016$  yang artinya sip pada pemerintah desa Kecamatan Sidoarjo memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa. Dimana hasil data statistik yang mencapai rata-rata  $28,26$  dari  $69$  responden memperlihatkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintahan yang dilakukan pada pemerintah desa di Kecamatan Sidoarjo sangat baik dan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Hasil

penelitian ini juga diperkuat oleh penelitian yang dilakukan Wirakusuma dan Setiawan (2019) yang memberikan hasil bahwa sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh negatif signifikan terhadap kecurangan akuntansi pada Kota Denpasar. Dimana semakin baik sistem pengendalian intern pemerintah dilakukan maka semakin rendah adanya tindakan-tindakan kecurangan yang dilakukan oleh para pegawai pemerintah desa. Dengan semakin baiknya sistem pengendalian intern yang dilakukan semakin baik sistem pengawasan dan sistem penyelenggaraan pemerintah desa dalam melakukan dan menjalankan tugas-tugas untuk dapat mencapai tujuan dalam memajukan dan mensejahterakan masyarakatnya. Pada hasil ini pemerintah desa Kecamatan Sidoarjo telah melakukan dan menjalankan prinsip-prinsip pengawasan dan menjalankan prinsip-prinsip dalam melakukan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dengan tidak adanya tindakan-tindakan kecurangan dalam melakukan mengelola keuangan desa. Secara garis besar sistem pengendalian intern pemerintah sangat dibutuhkan dalam menjalankan pemerintah yang baik dan bersih akan adanya tindakan kecurangan. Sistem pengendalian intern pemerintah yang digunakan harus kuat sebab apabila ada celah atau kelemahan sedikit pun maka akan timbul tindakan-tindakan kecurangan yang dapat merugikan pemerintah tersebut.

3. Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kecurangan Pada Pengelolaan Keuangan Desa  
Pada hasil analisis yang dilakukan diatas pada pemerintah desa Kecamatan Sidoarjo dimana budaya organisasi menghasilkan  $t_{hitung}$  sebesar  $-4,500$  dengan tingkat sig sebesar  $0,000$  yang artinya budaya organisasi mempunyai hasil negatif signifikan terhadap kecurangan pengelolaan keuangan desa. Hasil ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti dan Hanafi (2018) yang menjelaskan budaya organisasi memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada pemerintah desa di Kota Demak. Budaya organisasi yang diterapkan pada pemerintah desa menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan dan kesuksesan pemerintah desa dalam menjalankan kewajiban dan tanggungjawabnya kepada masyarakat. Hasil tersebut membuktikan bahwa pada pemerintah desa Kecamatan Sidoarjo telah melakukan sistem budaya organisasi yang baik dan benar pada birokrasi pemerintahannya dengan tingkat statistika rata-rata sebesar  $21,04$  dengan jumlah responden  $69$ . Sistem budaya organisasi yang baik akan timbul karena adanya komunikasi yang baik yang terjalin antara pegawai dengan atasan maupun antar pegawai, kerja sama dalam melakukan dan menyelesaikan tugas dan tanggungjawabnya kepada masyarakat, adanya rasa saling toleransi antara atasan dengan pegawai maupun dengan para pegawai itu sendiri dan tentunya adanya sikap saling menghormati antara sesama. Dengan adanya sistem budaya organisasi yang baik maka akan menjauhkan pemerintah desa dengan ladanya tindakan kecurangan yang dilakukan oleh para pegawai dalam melakukan tanggungjawab dan tugasnya dalam mengelola keuangan desa.

4. Pengaruh Kompetensi Terhadap Kecurangan Pada Pengelolaan Keuangan Desa

Hasil analisis pada variabel kompetensi pada penelitian ini memiliki hasil  $t_{hitung}$  sebesar  $2,437$  dengan tingkat sig sebesar  $0,018$  yang artinya kompetensi berpengaruh positif signifikan terhadap kecurangan pengelolaan keuangan desa pada pemerintah desa Kecamatan Sidoarjo. Hasil data statistika menunjukkan kompetensi mencapai rata-rata  $23,86$  dengan  $69$  responden, dimana kompetensi yang dimiliki para pegawai pada pemerintah desa Kecamatan Sidoarjo, dimana kompetensi sangat berpengaruh terhadap kelangsungan sistem birokrasi yang dijalankan pada pemerintah desa ini. Hal tersebut



didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Putra dan Rahayu (2019) yang menjelaskan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap kecurangan pada pemerintah. Kompetensi yang dimiliki para pegawai sangat dibutuhkan untuk dapat menyelesaikan tugas dan tanggungjawab yang diberikan oleh kepala desa dalam menjalankan program-program kerja yang telah ditentukan. Namun apabila kompetensi yang dimiliki oleh para pegawai tidak dilakukan dengan mestinya maka akan menimbulkan tindakan-tindakan yang tidak semestinya. Sebagai contoh apabila kompetensi pegawai dalam mengetahui kelemahan dan celah pada sistem pengendalian intern pada pemerintah desa yang tentunya akan mendorong adanya tindakan-tindakan kecurangan.

#### 4. SIMPULAN

Kesesuaian kompensasi memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kecurangan pada pengelolaan keuangan desa pada kecamatan sidoarjo. Kompensasi yang diberikan kepada pegawai pemerintah sudah sesuai dengan apa yang sudah menjadi tugas dan tanggungjawabnya kepada pemerintah desa. Hal tersebut menjadi kesesuaian kompensasi yang diterima pegawai pemerintah desa mengurangi adanya tindakan kecurangan; Sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh negatif signifikan terhadap kecurangan pada pemerintah Kecamatan Sidoarjo dalam hal pengelolaan keuangan desa. Hasil tersebut membuktikan bahwa pemerintah desa Kecamatan Sidoarjo sudah melakukan sistem pengawasan yang baik, sehingga dapat mengurangi adanya tindakan-tindakan kecurangan yang mungkin saja terjadi; Budaya organisasi berpengaruh negatif signifikan terhadap terjadi kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa yang dilakukan pemerintah desa Kecamatan Sidoarjo. Sistem budaya organisasi yang diterapkan pada pemerintah desa Kecamatan Sidoarjo sudah berjalan dengan baik dan benar, sehingga dapat mengurangi bahkan dapat menghilangkan praktik-pratik kecurangan yang mungkin saja terjadi apabila tidak adanya budaya organisasi yang baik; Kompetensi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kecurangan pada pengelolaan keuangan desa pada Kecamatan Sidoarjo. Apabila kompetensi yang dimiliki pegawai pemerintah desa dalam menyelesaikan pekerjaan dengan mudah itu merupakan hal baik, namun apabila pegawai pemerintah desa memiliki kompetensi dalam memahami kelemahan pengendalian intern maka pegawai pemerintah desa dapat dengan mudah memanfaatkan celah tersebut untuk melakukan tindakan kecurangan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ardana. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Ardiyos. 2012. *Kamus Standar Akuntansi*. Jakarta: Citra Harta Prima
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo (BPS). <https://sidoarjokab.bps.go.id>.
- Cressey, Donald R. 1953. *Other People's Money*. Paterson Smith. Montclair.
- Ernie Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah. 2006. *Pengantar Manajemen*. Edisi Pertama. Jakarta.
- Griffin, Jill. 2002. *Customer Loyalty. Menumbuhkan Dan Mempertahankan Kesetiaan Pelanggan*. Jakarta; Erlangga.

- Hasibuan, Malayu S. P. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hery. 2013. *Auditing (Pemeriksaan Akuntansi I)*, Cetakan Pertama, Jakarta: Caps (Center Of Academic Publishing Service).
- IAI. 2012. *Standart Profesional Akuntan Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Indonesia Corruption Watch (ICW). 2015-2018. *Jumlah Kasus Korupsi*. Icw, Jakarta.
- Kreitner, R. dan Kinicki, A. 2005. *Perilaku Organisasi*. Buku 1. Edisi Kelima. Jakarta: Salemba Empat.
- Laksmi, P. S. dan I Ketut Sujana. 2019. Pengaruh Kompetensi Sdm, Moralitas Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *E-Jurnal Akuntansi*. 26 (3).
- Putra, M. A. P. dan Nugroho Tulus Rahayu. 2019. Analisis Fraud Diamond Theory Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Guntur Kabupaten Demak. *Prosiding*. Vol2.
- Sari, M. E, Fefri I. A. dan Salma Taqwa. 2019. Pengaruh Akuntabilitas, Kesesuaian Kompensasi Dan Pengendalian Intern Terhadap Potensi Kecurangan Dana Desa. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*. 1(3)
- Sastrohadiwiryono, B.S. 2011. *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia Pendekatan Administratif Dan Operasional*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Sigit, Soehardi. 2003. *Perilaku Organisasi*. Yogyakarta : Terbitan Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa.
- Soelaiman. 2007. *Manajemen Kinerja - Langkah Efektif Untuk Membangun Mengendalikan Dan Evaluasi Kerja*. Cetakan Kedua. Jakarta: PT. Intermedia Personalia Utama.
- Wijayanti, Provita dan Rustam Hanafi. 2018. Pencegahan Fraud Di Pemerintah Desa. *Jurnal Akuntansi Multiaradigma*. 9(2).
- Wirakusuma, I G. dan Putu Ery Setiawanpengaruh. 2019. Pengendalian Internal, Kompetensi Dan Locus Of Control Pada Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. *E-Jurnal Akuntansi*. 26 (2).
- Wolfe, David T Dan Dana R. Hermanson. 2004. The Fraud Diamond: Considering The Four Elements Of Fraud. *Cpa Journal (Management Fraud)*: 38-42.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Zulkarnain, R. M. 2013. Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Fraud Pada Dinas Kota Surakarta. *Accounting Analysis Journal 2 (2)*: 125-130.